

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN KUOTA GRATIS UNTUK
PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI
COVID 19 DI PAUD AL-IKHLAS DESA PAYA
BENGKUANG KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh :

**KHAIKAL MUSTAFA
178520066**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/25

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN KUOTA GRATIS UNTUK
PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI
COVID 19 DI PAUD AL-IKHLAS DESA PAYA
BENGKUANG KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH:

**KHAIKAL MUSTAFA
178520066**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Program Bantuan Kuota Gratis untuk pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di PAUD AL IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat.

Nama Mahasiswa : Khaikal Mustafa

NPM : 178520066

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Agung Suharyanto, S.Sn M.Si Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos. M.AP

Mengetahui:

Dekan Ka. Prodi Administrasi Publik

Dr. Walid Mustafa Sembiring, S.Sos, M.I.P Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tanggal Lulus 02 Juli 2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2021



Khaikal Mustafa
178520066

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khaikal Mustafa
NPM : 178520066
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberi kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2021



Khaikal Mustafa
178520066

ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM BANTUAN KUOTA GRATIS UNTUK PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PAYA BENGKUANG KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT

Dampak Pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia mengharuskan dunia pendidikan untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar secara online, untuk mendukung hal itu pemerintah membuat program kuota gratis yang diberikan kepada pendidik dan peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah untuk pembelajaran daring di PAUD AL-IKHLAS Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di PAUD AL-IKHLAS Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021. Penelitian ini menggunakan teori Analisis Kebijakan William n Dunn dengan menggunakan tahap-tahap dalam menganalisis suatu kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan Program bantuan kuota gratis pemerintah untuk pembelajaran daring di PAUD AL-IKHLAS belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ketidak tepat sasaran Program ini jika diberikan untuk jenjang PAUD yang rata rata memiliki usia 4-5 Tahun. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Program bantuan kuota gratis pemerintah untuk pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Desa Paya Bengkuang khususnya di PAUD AL-IKHLAS tidak efektif jika diberikan kepada peserta didik PAUD karena akan kesulitan untuk memanfaatkan Program ini untuk pembelajaran online.

Kata Kunci: Analisis Program, Pembelajaran Daring

ABSTRACT

POLICY ANALYSIS GOVERNMENT FREE QUOTA ASSISTANCE PROGRAM FOR LINEAR LEARNING IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE VILLAGE PAYA BENGKUANG SUB-DISTRICT GEBANG DISTRICT LANGKAT

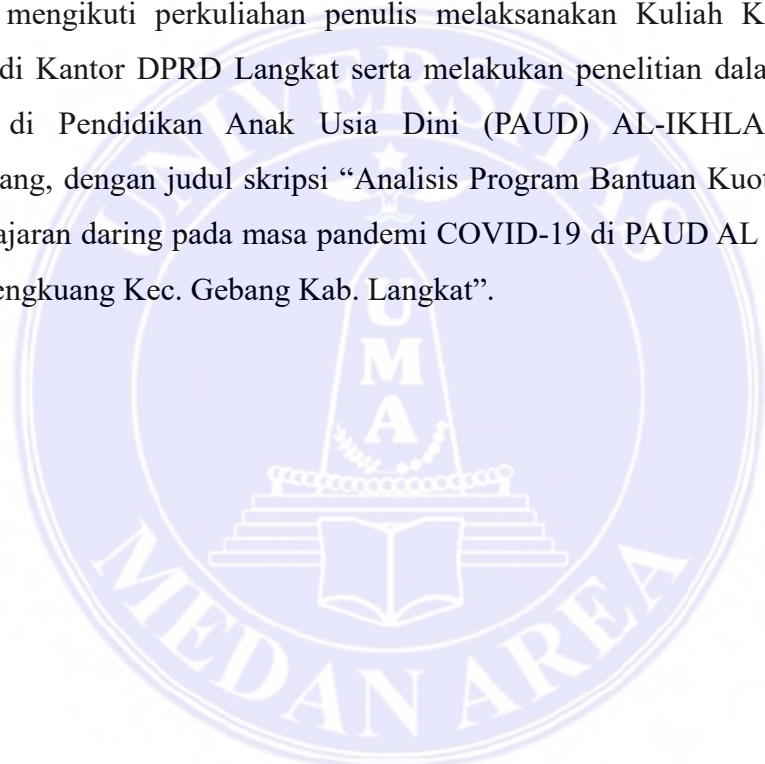
The impact of the COVID-19 pandemic that is endemic in Indonesia requires the world of education to carry out the learning and teaching process online, to support this the government has created a free quota program that is given to educators and students. The purpose of this study was to analyze the Government's Free Quota Assistance Program for online learning in PAUD AL-IKHLAS, Gebang District, Langkat Regency. This research was conducted at PAUD AL-IKHLAS, Gebang District, Langkat Regency. This research was conducted from January 2021 to March 2021. This study uses William n Dunn's Policy Analysis theory by using stages in analyzing a policy. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. Based on the results of data analysis carried out by the government's free quota assistance program for online learning in PAUD AL-IKHLAS, it has not been completely running well, this can be seen from the inaccuracy of this program if it is given to the PAUD level with an average age of 4-5 years. Based on the results of the study, it can be concluded that the government's free quota assistance program for online learning during the COVID-19 pandemic in Paya Bengkuang Village, especially in PAUD AL-IKHLAS, is not effective if given to PAUD students because it will be difficult to use this program for online learning.

Keywords: Policy Analysis, Online Learning.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Desa Paya Bengkuang, provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat pada tanggal 24 Juni 1999, anak kedua dari Ayahanda Muliono, S.Pd dan Ibunda Mustawadiah, S.Pd. Riwayat Pendidikan penulis adalah SD Negeri 050770 Desa Paya Bengkuang, SMP Negeri 2 Tanjung Pura, dan SMK Negeri 1 Tanjung Pura.

Tahun 2017 melanjutkan studi di Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Program Studi Administrasi Publik, selama mengikuti perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor DPRD Langkat serta melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-IKHLAS Desa Paya Bengkuang, dengan judul skripsi “Analisis Program Bantuan Kuota Gratis untuk pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di PAUD AL IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat”.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan tak lupa pula shalawat beserta salam senantiasa terucap kepada Nabi Muhammad SAW serta kaum dan seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dengan skripsi yang berjudul "Analisis Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah untuk Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat".

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyelesaikan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Mustafa Sembiring, S.Sos, M.I.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn M.Si, selaku pembimbing I penulis
5. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku pembimbing II penulis.

6. Bapak Selamat Riadi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Ibu Chairika Nasution, SAP MAP, selaku sekretaris dalam seminar proposal dan seminar hasil.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua cinta yaitu ayah saya Muliono dan ibu saya Mustawadiah serta adik saya Hairil Ihsan yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya.
9. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustawadiah, S.Pd selaku Kepala Sekolah PAUD AL-IKHLAS yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di PAUD AL-IKHLAS.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis dengan senantiasa menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta bagi perkembangan skripsi selanjutnya dan bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung penulis hingga skripsi ini selesai.

Medan, Juli 2021



Khaikal Mustafa
178520066

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Analisis Kebijakan	5
2.1.1 Pengertian Analisis Kebijakan.....	5
2.1.2 Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan	6
2.1.3 Tahap Analisis Kebijakan.....	8
2.2 Kebijakan tentang Pandemi dan Pendidikan.....	16
2.3. Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah.....	16
2.3.1. Rincian jumlah bantuan kuota gratis Pemerintah.....	17
2.3.2. Persyaratan Penerima Bantuan Kuota Gratis Pemerintah	18
2.3.3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Kuota Gratis Pemerintah	19
2.4. Pembelajaran Daring (E-learning).....	20
2.4.1. Definisi E-Learning	20
2.4.2. Karakteristik, Manfaat dan Fungsi E-Learning.....	21
2.4.3. Kelebihan dan Kelemahan E-Learning	26
2.5. Penelitian Terdahulu	27
2.6. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1. Lokasi Penelitian	33
3.2.2 Waktu Penelitian	33
3.3 Informan Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4.1 Observasi.....	35
3.4.2 Wawancara	36
3.4.3 Dokumentasi	37
2.6.1. Triangulasi Data	38

3.5	Teknis Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1.	Hasil Penelitian	41
4.1.1.	Sejarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-IKHLAS	41
4.1.2.	Visi, Misi dan Tujuan PAUD AL-IKHLAS	41
4.1.3.	Profil PAUD AL-IKHLAS	42
4.1.4.	Struktur Organisasi PAUD AL-IKHLAS	43
4.1.5.	Struktur Kepengurusan Satuan Lembaga PAUD	44
4.2.	Pembahasan.....	45
4.2.1.	Perumusan Masalah-masalah Kebijakan	45
4.2.2.	Peramalan Kebijakan di Masa Depan	46
4.2.3.	Rekomendasi Aksi-aksi Kebijakan	47
4.2.4.	Pemantauan Hasil-hasil Kebijakan	49
4.2.5.	Evaluasi Kinerja Kebijakan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		41
5.1.	Kesimpulan	41
5.2.	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA		43

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pendekatan Analisis Kebijakan (William N. Dunn, 1999 : 98)	8
Tabel 2. 2 Rincian Bantuan Kuota Internet	17
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	34
Tabel 4. 1 Daftar guru PAUD AL IKHLAS	42
Tabel 4. 2 Daftar Nama Guru yang sudah menerima bantuan kuota internet	50
Tabel 4. 3 Daftar Peserta didik yang sudah menerima dan belum menerima bantuan kuota internet	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung PAUD AL-IKHLAS	5
Gambar 2 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Lis Rahayu	5
Gambar 3 Dokumentasi wawancara dengan ibu Ajeng Sakinah Arianti	7
Gambar 4 Dokumentasi wawancara dengan ibu Irmayanti	7
Gambar 5 Dokumentasi wawancara dengan wali murid PAUD AL IKHLAS	8
Gambar 6 Dokumentasi wawancara dengan wali murid PAUD AL IKHLAS	8
Gambar 7 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Imam Mustamil	9



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyakit virus corona 2019 (Corona Virus Disease / COVID-19) sebuah nama baru yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) bagi pasien dengan infeksi virus corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Karakteristik virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. Virus Corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya pada dunia pendidikan.

Penyebaran pandemi telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti *social distancing*, *physical distancing*, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut menghambat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara Dalam Jaringan (Daring) yang bisa dilaksanakan dari rumah masing – masing siswa.

Dikarenakan wabah yang berkepanjangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer atau laptop, handphone dan alat bantu lain sebagai perantara yang tentu saja harus terhubung dengan koneksi internet. Proses pembelajaran daring ini sudah diterapkan hampir di semua Sekolah yang ada di Desa Paya Bengkuang termasuk di PAUD AL-IKHLAS Semua proses belajar mengajar dilakukan secara *online* melalui *Group Whatsapp*.

Untuk mendukung penerapan pembelajaran daring selama masa pandemi Covid 19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Persesjen Kemendikbud 14 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020, Peraturan ini ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa bantuan kuota data internet diberikan kepada siswa, mahasiswa, pendidik, guru serta dosen. Intinya dalam Juknis bantuan kuota data internet tahun 2020 tersebut bahwa bantuan yang diberikan Kemendikbud berupa kuota data internet dengan rincian dibagi atas kuota umum dan kuota belajar.

Kuota umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman, dan Kuota belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada <http://kouta-belajar.kemdikbud.go.id/>

Kebijakan tersebut sudah terimplementasikan di 6 PAUD yang ada di Desa Paya Bengkuang, dalam penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian di PAUD AL-IKHLAS dikarenakan PAUD AL-IKHLAS memiliki jumlah peserta didik yang lebih banyak diantara lainnya, sebagian kecil peserta didik PAUD AL-IKHLAS yang sudah memenuhi syarat di Juknis bantuan kuota data internet 2020 sudah mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB dan kuota belajar sebesar 15 GB. Tetapi berdasarkan observasi peneliti di PAUD AL-IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat masih ada beberapa Peserta didik yang belum menerima Bantuan Kuota Gratis Pemerintah.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah PAUD AL-IKHLAS yaitu Ibu Mustawadiah, S.Pd, beliau mengatakan bahwa ada beberapa peserta didik yang belum menerima bantuan kuota internet dari pemerintah dikarenakan pihak sekolah terlebih dahulu melakukan sinkronisasi data peserta didik dari pada program ini dikeluarkan dan pada saat melakukan sinkronisasi data nomor telepon masih kosong dikarenakan wali murid tidak mengisi data nomor telepon pada saat mendaftarkan anaknya ke PAUD AL-IKHLAS.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Program Bantuan Kuota Gratis untuk Pembelajaran Daring pada masa Pandemi Covid 19 Di PAUD AL IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: Menganalisis Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah

untuk Pembelajaran Daring di Sekolah PAUD di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk menganalisis Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah untuk Pembelajaran Daring di Sekolah PAUD di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Akademis

1. Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir dalam menulis karya ilmiah tentang Implementasi Kebijakan / Peraturan Pemerintah

1.4.1 Secara Teoritis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada Pengimplementasian suatu Kebijakan/Peraturan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kebijakan

2.1.1 Pengertian Analisis Kebijakan

Menurut Raymond A. Bauer Analisis Kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan (Dunn, 1999 : 1) Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Menurut William N. Dunn bahwa yang dimaksud dengan analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan (Afifah& Yuningsih, 2016:336).

Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan tidak dimaksudkan menggantikan politik dan membangun elite teknokratis. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan Nugroho, 2009 : 269-270 dalam (Afifah& Yuningsih, 2016:336).

Analisis kebijakan itu dapat dilakukan sebelum atau setelah kebijakan diimplementasikan, menurut William N. Dunn berpendapat bahwa, Prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi (*ex ante*), sedangkan

deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah suatu tindakan berlangsung (*expost*). Prediksi dan preskripsi berhubungan dengan masa depan, sementara deskripsi dan evaluasi berhubungan dengan masa lalu (Dunn, 1999: 100-101).

2.1.2 Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan publik memiliki beberapa macam bentuk seperti halnya yang dikemukakan oleh Dunn (1999:117) antara lain : Analisis Prospektif, Analisis Retrospektif, dan Analisis Terintegrasi.

a. Analisis Prospektif

Analisis ini berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan. Analisis ini seringkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya.

b. Analisis Retrospektif

Analisis ini merupakan penciptaan atau transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Analisis retrospektif mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis, yaitu :

- Analisis yang berorientasi pada disiplin. Analisis ini berusaha untuk mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori dan menerangkan sebab – sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan.

Kelompok analisis ini tidak berusaha mengidentifikasi tujuan dan sasaran mengapa suatu kebijakan dibuat.

- Analisis yang berorientasi pada masalah. Analisis ini menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan. Kelompok analisis ini kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori, namun lebih kepada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi suatu masalah.
- Analisis yang berorientasi pada aplikasi. Kelompok analisis ini juga berusaha untuk menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik, tetapi tidak melakukan pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Kelompok ini menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan serta melakukan identifikasi tujuan dan sasaran dari para pembuat kebijakan.

c. Analisis Terintegrasi

Analisis terintegrasi merupakan gabungan antara analisis prospektif dan retrospektif. Analisis ini cenderung kepada penciptaan transformasi kebijakan sebelum dan sesudah tindakan kebijakan dilakukan. Analisis ini berusaha terus-menerus untuk menghasilkan informasi setiap saat. Analisis ini akan terus dilakukan berulang kali sebelum akhirnya pemecahan masalah ditemukan.

Penelitian ini mengarah pada analisis Retrospektif atau *ex post*, dimana analisis ini dilakukan setelah aksi kebijakan dilakukan. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang

bersifat : *deskriptif*, *evaluatif*, dan *preskriptif*. Analisis kebijakan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu :

1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi ?
2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. (Dunn, 1999:97).

Untuk menjawab analisis kebijakan dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari ketiga pendekatan analisis ini : *empiris* dan *normatif*. Pendekatan tersebut dipaparkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Pendekatan Analisis Kebijakan (William N. Dunn, 1999 : 98)

No	Pendekatan	Pertanyaan Utama	Tipe Informasi
1	Empiris	Adakah dan akankah ada (fakta)	Deskriptif dan Prediktif
2	Normatif	Apa manfaatnya (nilai)	Evaluatif

Tabel 1, dapat menjelaskan bahwa pendekatan empirik atau empiris akan berbicara mengenai realitas-realitas kebijakan yang terjadi atau menerangkan dan menunjukkan fakta fakta yang terjadi baik pada tahap implementasi dan atau evaluasi kebijakan. Realitas-realitas ini berupa fakta yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif atau prediktif.

2.1.3 Tahap Analisis Kebijakan

Dunn (1999: 208-608) mengemukakan analisis kebijakan melalui lima tahap sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah Kebijakan

Perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternative, dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, dan otorisasi pengaturan arahan-arahan. Menyusun masalah kebijakan terdiri dari tiga langkah, yaitu: mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah. Tiap-tiap langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi, dan bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas pada perlunya dibuat kebijakan karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Metode menyusun masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara mendalam dan mengsingkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan sumsi-asumsi yang mendasarinya guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan *agenda setting*. Proses analisis masalah ini menjelaskan bahwa pada tahapan *Understanding the problem* adalah memahami permasalahan dengan melakukan analisis permasalahan yang dihadapi melalui: menerima masalah (analisis gejala), memilih masalah (analisis kegagalan pasar & pemerintah), memodelkan masalah (identifikasi variable kebijakan). Selanjutnya pada tahapan (P2) *choosing and explaining relevant policy goal and constraints* adalah melakukan pemilihan masalah, dan pada tahap (P3) yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah.

2. Meramalkan Alternatif Kebijakan (Prediksi)

Para ahli analisis kebijakan harus meramalkan apa yang akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang, setelah itu menyediakan sejumlah alternatif objektif yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.

Tahapan analisis pertama akan menghasilkan kebijakan-kebijakan alternative melalui pencarian solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta tentang permasalahan yang akan terjadi di masa depan akibat dari alternatif yang dirumuskan atau tidak melakukan alternative tersebut dan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan.

3. Merekomendasikan Penerapan Kebijakan (*Preskripsi*)

Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja akan tetapi berhubungan dengan aspek *normatif*. Untuk itu pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.

Ciri-ciri rekomendasi adalah fokus tindakan dan orientasi masa depan, prospek saling ketergantungan, nilai nyata dan nilai ganda penerapan kebijakan

yang terstruktur dalam rekomendasi tidak hanya teoritis dan logika empiris akan tetapi memberikan keuntungan yang langsung dapat diwujudkan atau diperoleh. Tahapan ini juga merupakan hasil dari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya sudah diestimasi melalui peramalan, dilakukan pada tahapan adopsi kebijakan.

Penerapan kebijakan meliputi usaha-usaha untuk mentransformasi keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. penerapan kebijakn sebagai bagian penting dari proses kebijakan, karena kegagalan dan keberhasilan suatu kebijaka akan tergantung pada proses penerapan kebijakan. Kegagalan suatu kebijakn dapat diakibatkan karena pelaksanaan implementasi kebijakan yang tidak tepat.

Kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

4. Monitoring Kebijakan (*Deskripsi*)

Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik. Monitoring merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan berimbas sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative

kebijakan tersebut. Monitoring ini membantu para ahli analisis untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dengan hasilnya.

Tahapan ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang suatu kebijakan maka kebijakan yang dibuat perlu dukungan dari publik terutama badan badan legislative. Karena sebuah kebijakan perlu dukungan dari mayoritas.guna menuju monitoring kebijakan yang baik.

Monitoring kebijakan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab-akibat dari kebijakan publik. Monitoring ini memerlukan analisis yang menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dan outcome-nya dengan sumber utamanya pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan. Sehingga monitoring menghasilkan klaim yang terencana selama dan sesudah kebijakan itu diadopsi dan diimplementasikan.

Ada empat fungsi monitoring ini, fungsi ini menjelaskan bahwa :

- Kepatuhan

Kepatuhan ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah kegiatan dari program administrator, staff, dan stakeholder sesuai dengan standart dan prosedur yang telah dibuat oleh legislatif, lembaga pembuat undnag-undang, dan lembaga professional.

- Auditing

Auditing ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah sumber-sumber dan jasa yang ditujukan untuk kelompok sasaran dan yang berhak menerimanya (individu, keluarga, pemerintah daerah) telah sampai kepada mereka.

- Akunting

Akunting ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam menghasilkan informasi yang membantu dalam akunting social dan perubahan ekonomi yang mengikuti implementasi seperangkat kebijakan publik dan program yang lalu.

- Penjelasan / Eksplanasi

Eksplantasi ini dapat membantu monitoring dalam menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa outcome dari kebijakan publik dan programnya berbeda.

5. Mengevaluasi Kinerja Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakebut yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yag memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik. Evaluasi ini juga dapat menggeneralisasikan informasi tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan, nilai, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Monitoring menjawab pertanyaan” apa, bagaimana, mengapa terjadi.

Tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kebijakan yang

dihasilkan. Penilaian kebijakan menghasilkan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan masalah, sebab dalam evaluasi kebijakan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria ini telah dibahas dalam hubungannya dengan rekomendasi kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi adalah pada waktu ketika ditetapkan atau dipublikasi. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif (*expost*), sedangkan kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (*exante*). Kriteria-kriteria evaluasi hasil kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diterapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

b. Efisiensi (*eficiency*)

Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produksi atau layanan.

c. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya

masalah. Keriteria kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Pemerataan / Kesamaan (*equity*)

Pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan social dan merujuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usahanya didistribusikan secara adil.

e. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya: efektivitas, efisiensi, kecukupan pemerataan dianggap masih gagal jika belum menanggapi (*responsive*) terhadap kebutuhan aktual dari suatu kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan (*appropriateness*)

erat hubungan dengan rasionalitas substantive karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut

2.2 Kebijakan tentang Pandemi dan Pendidikan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan.
- c. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
- d. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, 516, HK.03.01/MENKES/363/2020, 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- e. Surat edaran Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

2.3. Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah

Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara daring, pemerintah telah mengeluarkan Persesjen Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang junis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020, Program ini telah ditetapkan oleh

Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 September 2020 di Jakarta.

2.3.1. Rincian jumlah bantuan kuota gratis Pemerintah

Bantuan kuota gratis pemerintah dibagi atas :

- a. Kuota umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman, dan
- b. Kuota belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada <http://kوتا-belajar.kemdikbud.go.id/>

Rincian bantuan kuota data internet sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rincian Bantuan Kuota Internet

No	Uraian	Volume	Pembagian kuota		Durasi bantuan
			Kuota umum	Kuota belajar	
1	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 GB /Bulan	5 GB / Bulan	15 GB /Bulan	4 Bulan
2	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	35 GB /Bulan	5 GB / Bulan	30 GB /Bulan	4 Bulan
3	Paket Kuota Data Internet untuk pendidi pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	42 GB /Bulan	5 GB / Bulan	37 GB /Bulan	4 Bulan
4	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	50 GB /Bulan	5 GB / Bulan	45 GB /Bulan	4 Bulan

Sumber (Persesjen Nomor 14 Tahun 2020)

2.3.2. Persyaratan Penerima Bantuan Kuota Gratis Pemerintah

Penerima bantuan kuota gratis Pemerintah diberikan kepada, Peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidik pada PAUD, dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Mahasiswa dan Dosen. Penerima bantuan kuota gratis Pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Peserta didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - a. Terdaftar di aplikasi Dapodik
 - b. Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua / anggota keluarga / wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - a. Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif
 - b. Memiliki nomor ponsel aktif
3. Mahasiswa
 - a. Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang *double degree*
 - b. Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan
 - c. Memiliki nomor ponsel aktif.
4. Dosen
 - a. Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahunajaran 2020/2021
 - b. Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK atau NUP)
 - c. Memiliki nomor ponsel aktif.

2.3.3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Kuota Gratis Pemerintah

Mekanisme penyaluran Bantuan Kuota Gratis pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi menetapkan jumlah penerima bantuan kuota dan internet sesuai dengan SPTJM.
2. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengirim daftar penerima bantuan kuota data Internet kepada operator seluler.
3. Operator seluler mengirimkan kuota data internet sesuai dengan daftar penerima bantuan kuota data internet dari Pusat Data dan Teknologi Informasi.
4. Operator seluler melaporkan hasil pengiriman kota data internet kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
5. Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
 - 1) Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020
 - 2) Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020
 - b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
 - 1) Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020
 - 2) Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020
 - c. Bantan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.

- 1) Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020
 - 2) Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020
6. Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut :
- a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik
 - b. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
7. Setiap Penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

2.4. Pembelajaran Daring (E-learning)

2.4.1. Definisi E-Learning

E-learning tersusun dari dua bagian, yaitu “e” yang merupakan singkatan dari “ *electronica* ” dan “*learning*” yang bearti “pembelajaran”. Jadi *e-learning* bearti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik. Jadi dalam pelaksanaannya, *e-learning* menggunakan audio, vidio atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Dengan kata lain *e-learning* adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, vidiotape, transmisi satelite atau komputer sejalan dengan itu, Onno W. Purbo (dalam Amin, 2004:168) menjelaskan bahwa istilah “e” dalam *e-learning* adalah segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronk internet. Pengajaran boleh

disampaikan pada waktu yang sama (*synchronously*) ataupun pada waktu yang berbeda (*asynchronously*).

Secara lebih singkat William Horton mengemukakan bahwa (dalam Sembel, 2004) *e-learning* merukan kegiatan pembelajaran berbasis web (yang bisa diakses dari internet). Tidak jauh berbeda dengan itu Brown (2000) dan Feasey (2001) dalam Siahaan, (2002:124) secara sederhana mengatakan bahwa *e-learning* merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan (Internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitas yang didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya.

2.4.2. Karakteristik, Manfaat dan Fungsi E-Learning

A. Karakteristik *e-learning* ini antara lain :

1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Sehingga dapat memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik antara pengajar dengan pembelajar, atau pembelajar dengan pembelajar.
2. Memanfaatkan media komputer, seperti jaringan komputer (*computer network*) atau (digital media).
3. Menggunakan materi pembelajaran untuk dipejari secara mandiri (*self learing materials*).
4. Materi pembelajaran dapat disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan dimana saja bila yang bersangkutan memerlukannya.
5. Memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk mengetahui hasil kemajuan belajar, atau administrasi pendidikan serta

untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi.

B. Manfaat E-learning

E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi pelajaran. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran atau kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Selain itu, guru dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, guru dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula.

Secara lebih rinci, manfaat *e-learning* dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan pendidik.

1) Sudut pandang Peserta didik

Dengan kegiatan *e-learning* dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Menurut Brown, (2000) dalam Siahaan (2002) ini dapat mengatasi siswa yang :

- a. Mengikuti program pendidikan keluarga di rumah (*home schoolers*) untuk mempelajari materi yang tidak dapat diajarkan oleh orang tuanya, seperti bahasa asing dan keterampilan di bidang komputer.
- b. Merasa phobia dengan sekolah atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang putus sekolah tapi berminat melanjutkan

pendidikannya, maupun peserta didik yang berada diberbagai daerah atau bahkan yang berada di luar negeri.

- c. Tidak tertampung di sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan.

2) Sudut pandang Pendidik

Menurut Soekarti dalam Siahaan (2002:98) beberapa manfaat yang diperoleh pendidik adalah bahwa pendidik dapat :

- a. Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi.
- b. Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasannya karena waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak.
- c. Memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik.

Selain itu, manfaat *e-learning* dengan penggunaan internet, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh antara lain :

1. Guru dan siswa dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh tempat, jarak dan waktu. Secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi bisa dilakukan.
2. Guru dan siswa dapat menggunakan materi pembelajaran yang ruang lingkup (*scope*) dan urrutan sudah sistematis terjadwal melalui internet.
3. Dengan *e-learning* dapat menjelaskan materi pembelajaran yang sulit dan rumit menjadi mudah dan sederhana. Selain itu, materi

pembelajaran dapat disimpan di komputer, sehingga peserta didik dapat mempelajari kembali atau mengulang materi pembelajaran yang telah dipelajarinya setiap saat dan dimana saja sesuai dengan kebutuhannya.

4. Mempermudah dan mempercepat mengakses atau memperoleh banyak informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dipelajarinya dari berbagai sumber informasi dengan melakukan akses di internet.
5. Relatif lebih efisien dari segi waktu, tempat dan biaya.
6. Bagi pembelajar yang sudah bekerja dan sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak mempunyai waktu untuk datang ke suatu lembaga pendidikan maka dapat mengakses internet kapanpun sesuai dengan waktu luangnya.
7. Dari segi biaya, penyediaan layanan internet lebih kecil biayanya dibandingkan harus membangun ruangan atau kelas pada lembaga pendidikan sekaligus memeliharanya, serta menggaji pegawainya.

C. Fungsi E-Learning

Menurut Siahaan, (2002:111) setidaknya ada 3 (tiga) fungsi pembelajaran elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas (*classroom instruction*), yaitu:

1. Suplemen (Tambahan)

Dikatakan berfungsi sebagai suplemen, apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban / keharusan bagi

peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekali pun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan.

2. Komplemen (Pelengkap)

Dikatakan berfungsi sebagai komplemen, apabila materi *e-learning* diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi *e-learning* diprogram untuk menjadi materi *enrichment* (pengayaan) atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional.

Sebagai *enrichment*, apabila peserta didik dapat dengan cepat menguasai/memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka diberikan kesempatan untuk mengakses materi *e-learning* yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka, tujuannya agar semakin memantapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang disajikan guru di kelas.

Sebagai remedial, apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka di kelas. Tujuannya agar peserta didik semakin lebih mudah memahami materi pembelajaran yang disajikan guru di kelas.

3. Substitusi (Pengganti)

Tujuan dari *e-learning* sebagai pengganti kelas konvensional adalah agar peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari.

2.4.3. Kelebihan dan Kelemahan E-Learning

A. Kelebihan E-Learning

e-learning dapat dengan cepat diterima dan kemudian diadopsi adalah karena memiliki kelebihan / keunggulan sebagai berikut (Effendi, 2005:79) dalam Sadikin (2020: 218)

1. Pengurangan Biaya
2. Fleksibilitas. Dapat belajar kapan dan dimana saja, selama terhubung dengan internet.
3. Personalisasi, Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajar mereka.
4. Standarisasi, dengan *e-learning* mengatasi adanya perbedaan yang berasal dari guru, seperti : cara mengajarnya, materi dan penguasaan materi yang berbeda, sehingga memberikan standar kualitas yang lebih konsisten.
5. Kecepatan, kecepatan distribusi materi pelajaran akan meningkat karena pelajaran tersebut dapat dengan cepat disampaikan melalui internet.

B. Kekurangan atau Kelemahan E-Learning

Walaupun demikian pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau *e-learning* juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan antara lain :

1. Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar peserta didik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya *values* dalam proses belajar mengajar.

2. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan bukan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau psikomotor dan aspek afektif.
3. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi cenderung gagal.
4. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet.
5. Keterbatasan ketersediaan *software* (perangkat lunak) yang biayanya masih relatif mahal.

2.5. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu oleh peneliti lain, dan memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Wati tahun 2013 dengan judul: Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengembangan dan penataan pasar tradisional (study kasus pada pasar pagi arengka pekanbaru). Di Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian ini diketahui bahwa sebanyak 32 orang atau sebesar 42,8% Pedagang Kaki Lima menyatakan setuju dengan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengembangan dan penataan pasar tradisional .

Pada penelitian terdahulu ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah banyak disetujui oleh masyarakat kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini Program bantuan kuota internet yang dikeluarkan pemerintah kurang disetujui oleh masyarakat PAUD AL IKHLAS Desa Paya Bengkuang dikarenakan ketidaktepatan sasaran program ini apabila ditujukan kepada peserta didik PAUD yang memiliki Usia 4-5 Tahun.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nusrak Ade Syahputra tahun 2014 dengan judul: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam Penanganan Anak Jalanan, Di Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya anak jalanan di Kota Bengkulu disebabkan masih kurangnya tindakan pemerintah terhadap anak jalanan, belum ada tindakan pemerintah yang nyata dalam penanganan anak jalanan, belum ada kebijakan berupa aturan formal dalam penanganan anak jalanan.

Pada penelitian terdahulu ini Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam Penanganan Anak Jalanan masih kurang efektif karena belum ada tindakan nyata dari pemerintah dalam penanganan anak jalanan. Dalam penelitian ini Program Bantuan Kuota Internet pemerintah masih kurang efektif dikarenakan belum ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Program bantuan kuota internet ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Juwita tahun 2020 dengan judul : Analisis Kebijakan Proses Digitalisasi Koleksi dan Informasi Aceh (PDIA) Banda Aceh, di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tidak memiliki kebijakan khusus dalam proses digitalisasi koleksi.

Pada Penelitian terdahulu ini Kebijakan Proses digitalisasi Koleksi tidak memiliki kebijakan khusus dalam proses digitalisasi koleksi. Dalam Penelitian ini program bantuan kuota internet belum ada kebijakan khusus yang

diberikan pemerintah untuk jenjang PAUD karena jika program bantuan kuota internet ini diberikan kepada peserta didik PAUD sulit untuk dimanfaatkan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Susy Susilawaty tahun 2007 dengan judul : Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Tasikmalaya, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Hasil Penelitian ini menyatakan pelaksanaan K3 di kota Tasikmalaya belum optimal untuk itu perlu dukungan berupa Peraturan daerah atau Surat Keputusan Walikota tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, namun sampai saat ini pelaksanaan tugasnya baru berdasarkan tupoksi yang ada dalam dinas terkait dengan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada penelitian terdahulu ini pelaksanaan K3 di kota tasikmalaya belum optimal Karena masih membutuhkan dukungan berupa peraturan daerah. Dalam Penelitian ini Program bantuan kuota internet untuk peserta didik PAUD juga kurang optimal apabila tidak didukung dengan kebijakan lain, dikarenakan Program ini sulit dimanfaatkan oleh peserta didik PAUD .

5. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Alamsyah tahun 2013 dengan judul : Analisis Implementasi Kebijakan program Pendidikan Gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulu Kumba, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan gratis di Desa Bontotanga berjalan dengan baik dan hal yang menjadi pendukung implementasi pendidikan gratis ini ialah pihak yang terkait dalam hal ini para implementor menjalin kerja sama yang baik dalam hal kebijakan program pendidikan gratis

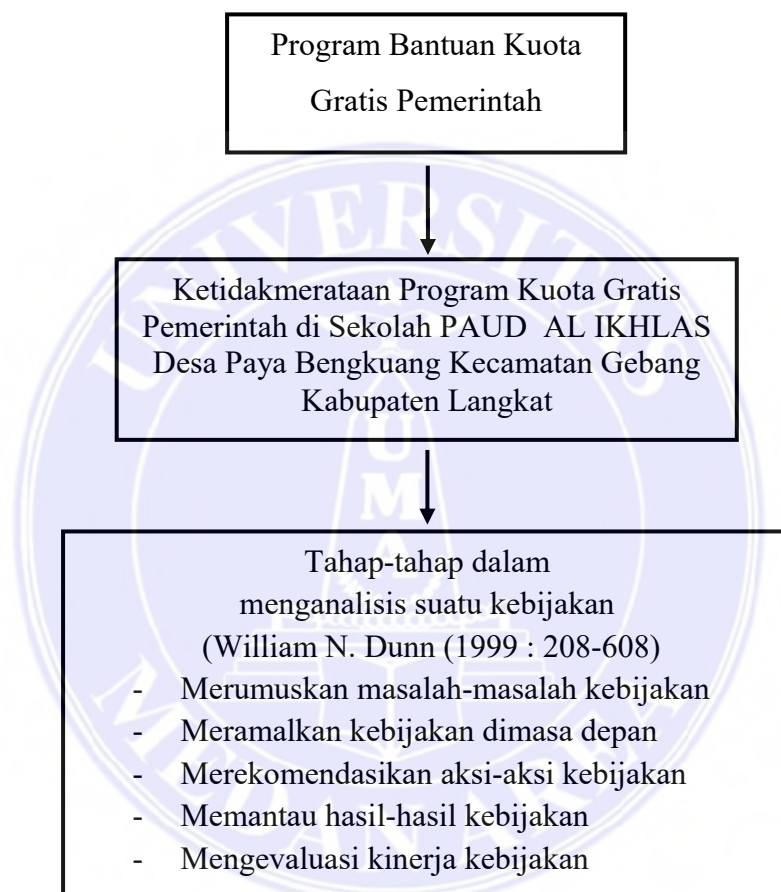
serta sumber daya yang memadai dalam menjalankan program pendidikan gratis.

Pada penelitian terdahulu ini pengimplementasian pendidikan gratis di desa Bontotanga berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini Program Bantuan Kuota internet pengimplementasian di PAUD AL-IKHLAS juga berjalan dengan baik, pendidik dan peserta didik yang sudah memenuhi syarat sudah mendapatkan bantuan kuota internet sesuai juknis.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan sosial mengenal ketidakmerataan Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah untuk Pembelajaran Daring di Sekolah PAUD di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dunn (1999: 208) mengemukakan untuk menganalisis kebijakan dapat melalui beberapa tahap antara lain: Merumuskan masalah – masalah kebijakan, meramalkan kebijakan dimasa depan, merekomendasikan aksi-aksi kebijakan, memantau hasil-hasil kebijakan dan mengevaluasi kinerja kebijakan.

Peneliti menggunakan Teori yang dikemukakan William N Dunn tentang bagaimana cara untuk menganalisis suatu kebijakan agar dapat lebih mudah mengetahui Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah untuk Pembelajaran Daring di Sekolah PAUD di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.



Bagan 2.7 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait dengan masalah yang sifatnya sosial dan peneliti ingin melakukan eksplorasi secara mendalam. Sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dimana pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan subjek penelitian, berdasarkan fakta – fakta yang kelihatan dilapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan berbagai data yang dihimpun, kemudian dihimpun setelah itu dianalisis kemudian bergerak kearah kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengimplementasian kuota internet gratis pemerintah.

Menurut Sugiyono (2015 : 15) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Menurut Sugiyono (2015 : 21) Karakteristik penelitian Kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis kebijakan Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah di 1 Sekolah PAUD di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, untuk mencari penyebab mengapa bisa terjadi ketidakmerataan program tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian lokasi merupakan objek penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian adalah di PAUD AL IKHLAS di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis melaksanakan penelitian secara bertahap hingga selesai penelitian. Adapun tahapan perincian kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan yang tertera tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021
1.	Penyusunan proposal									
2.	Seminar proposal									
3.	Perbaikan proposal									
4.	Pengambilan Data/Penelitian									
5.	Penyusunan skripsi									
6.	Seminar hasil									
7.	Perbaikan Skripsi									
8.	Sidang meja hijau									

3.3 Informan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian informan memiliki peranan yang penting dalam pengambilan data atau informasi menurut Hendraso dalam Suryanto (2005: 171 – 172). Informan penelitian ada tiga macam, yaitu informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*general informan*) dan informan tambahan.

1. Informan kunci (*key informan*),

Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah PAUD AL IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Langkat

2. Informan utama atau umum (*general informan*)

Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah 5 orang tua murid dan 3 guru di Sekolah PAUD AL IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

3. Informan tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah Seorang Operator Sekolah PAUD di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi dilapangan. Seperti halnya yang dikatakan Poerwandri dalam Gunawan (2013:143) berpendapat bahwa

observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara – cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.

Husaini Usman dalam Hartomo (2017:90) bahwa observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (*reliabilitas*) dan kesahihannya (*validitas*).

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan observasi di PAUD AL-IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan telah mendapatkan data bahwasannya tidak semua peserta didik menerima Program Bantuan Kuota Gratis dari Pemerintah dikarenakan pihak sekolah terlebih dahulu melakukan sinkronisasi data peserta didik dari pada program kuota internet gratis ini dikerluarkan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang informan. Setyadin (dalam Gunawan 2013:160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Husaini Usman dan Purmomo Setiady dalam Hartono (2018:90), menyimpulkan bahwa wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interview*. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian, dengan cara

Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang didapatkan pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancari disebut *interview*.

Dalam Penelitian ini Peneliti melakukan wawancara dengan wali murid PAUD AL-IKHLAS untuk menanyakan tentang perumusan dari program kuota gratis dari pemerintah, adakah Rumusan kebijakan untuk ke depan, Rekomendasi untuk kebijakan yang dikeluarkan dan apakah ada evaluasi kebijakan yang dilakukan setelah program dijalankan, Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan Guru PAUD AL-IKHLAS untuk menanyakan tentang perumusan dari program kuota gratis dari pemerintah, adakah Rumusan kebijakan untuk ke depan, Rekomendasi untuk kebijakan yang dikeluarkan dan apakah ada evaluasi kebijakan yang dilakukan setelah program dijalankan,. Serta peneliti melakukan wawancara dengan seorang Operator Sekolah PAUD AL-IKHLAS untuk menanyakan tentang perumusan dari program kuota gratis dari pemerintah, adakah Rumusan kebijakan untuk ke depan, Rekomendasi untuk kebijakan yang dikeluarkan dan apakah ada evaluasi kebijakan yang dilakukan setelah program dijalankan,

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, surat kabar, dan rekaman. Menurut Sugiyono (2015:239), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.

Menurut Burhan Bungin dalam Gunawan, (2013:176), teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

Guba dalam Gunawan (2013: 176) menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan *record*. Definisi dari *record* adalah setiap pernyataan tertulis oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akuntin. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu proses pembuktian yang akurat untuk pengumpulan data dalam penelitian, baik itu yang bersifat tertulis, gambar, karya – karya, maupun buku.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang diberikan oleh kepala sekolah PAUD AL-IKHLAS seperti data peserta didik yang sudah menerima program bantuan kuota gratis pemerintah dan data peserta didik yang belum menerima program bantuan kuota gratis pemerintah, dan peneliti mencatat semua jawaban dari hasil wawancara dengan wali murid, guru dan operator Sekolah PAUD Al Ikhlas Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

2.6.1. Triangulasi Data

Trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan atau menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Sugiyono, (2007: 372) mengemukakan bahwa triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data peserta didik yang sudah dan belum menerima bantuan kuota internet dengan hasil wawancara dengan narasumber.

3.5 Teknis Analisis Data

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015: 337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti. Untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti mencari data tentang bagaimana Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah di Sekolah PAUD AL-IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan text yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Kebijakan Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah di Sekolah PAUD AL-IKHLAS Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing /Verification*).

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di temukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan dengan cara mengumpulkan semua data / bukti-bukti dan hasil wawancara, kemudian mencari penyebab mengapa peserta didik di PAUD AL-IKHLAS belum menerima Bantuan Kuota Internet Gratis Pemerintah untuk pembelajaran daring..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, (a) Perumusan dari Program Bantuan Kuota Internet dapat mendukung proses belajar mengajar secara *onlien* di PAUD AL-IKHLAS, (b) Peramalan Kebijakan di Masa Depan dari Program Bantuan Kuota Internet ini apabila pandemi COVID-19 belum berakhir maka program ini dapat dilanjutkan/diberikan kembali tidak hanya periode September sampai Desember, (c) Rekomendasi Aksi-aksi Kebijakan yang disampaikan masyarakat PAUD AL-IKHLAS Pemerintah dapat membuat kebijakan baru mengenai pelaksanaan belajar mengajar dalam situasi pandemi COVID-19 khususnya jenjang PAUD diizinkan untuk belajar secara tatap muka, (d) Pemantauan Hasil Kebijakan pada Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah sudah terimplementasi sesuai dengan Persesjen Nomor 14 Tahun 2020, (e) Evaluasi Kebijakan dari Program Bantuan Kuota Gratis Pemerintah untuk pembelajaran daring tidak tepat sasaran apabila ditujukan pada jenjang PAUD yang memiliki peserta didik dengan usia 4-5 tahun.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dimasa yang akan datang pemerintah membuat kebijakan khususnya untuk jenjang PAUD diperbolehkan belajar secara tatap muka dengan mematuhi protocol kesehatan mengingat tempat tinggal peserta didik tidak jauh dari sekolah.

2. Diharapkan pemerintah lebih mempermudah cara/syarat untuk mendapatkan bantuan kuota internet, karena untuk saat ini tergolong sulit untuk masyarakat awam yang tinggal dipedesaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn, Willam N. (1999), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gunawan, Imam.(2013),*Metode Penelitian Kualitatif ; Teori dan Praktik*. Bumi Aksara, Jakarta
- Hartono, Jogiyanto. (2018), *Metode Pengumpulan dan Teknis Analisis Data*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. (2005), *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Winarno, Budi, (2011). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.

Jurnal :

- Afifah, Dian Fitriani. dan Neneng Yani Yuningsih. (2016). *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Di Kabupaten Cianjur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2, (2) : 330-360.
- Herliandry, Luh Devi. Nuhasanah. Maria Enjelina Suban. Heru Kuswanto. (2020), *Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol 22, No 1 : 65-70.
- Rokim. (2019), *Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Studi Islam, 14, (2) : 60-69.
- Sadikin, Ali. dan Afreni Hamidah. (2020), *Pembelajaran Daring di Tengah Covid 19*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, 6, (02) : 214-224.

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Sekretaris Jendral Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid 19.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan.

Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, menteri Kesehatan dan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, 516, HK.03.01/MENKES/363/2020, 440-882 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Publikasi Elektronik :

Sembel, Roy. 2004. Yang perlu anda tahu tentang E-learning. <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2004/0217/man01.html>, [28 Oktober 2020]

Siahaan, Sudirman. 2002. E-learning (Pembelajaran Elektronik) Sebagai Salah Satu Alternatif Kegiatan Pembelajaran. <http://www.depdiknas.go.id/jurna;/42/sudirman.htm>, [28 Oktober 2020].

Skripsi :

Wati, Lina. 2013. *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional (Study Kasus pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.

Alamsyah, Asrul. 2013. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis di Desa Bontotanga Kec. Bontotiro Kab. Bulu Kumba*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Syahputra, Nusrak Ade 2014. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam Penanganan Anak Jalanan*. Skripsi Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Juwita. 2020. *Analisis Kebijakan Proses Digitalisasi Koleksi dan Informasi Aceh (PDAI) Banda Aceh*. Skripsi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh.

Susilawaty, Susy. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Tasikmalaya*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.



LAMPIRAN I

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Apakah perumusan masalah dalam program bantuan kuota internet sudah dapat mengatasi masalah yang terjadi di PAUD AL IKHLAS ?
2. Adakah rumusan kebijakan untuk di masa mendatang sebelum dikeluarkan kebijakan program bantuan kuota internet gratis untuk pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ?
3. Adakah rekomendasi untuk program bantuan kuota internet gratis untuk pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ?
4. Apakah bantuan kuota internet yang diterima sesuai dengan Persesjen Nomor 14 Tahun 2020 ?
5. Adakah evaluasi yang dilakukan pemerintah pada saat Program ini dikeluarkan dan setelah dijalankan ?

LAMPIRAN II

1. Informan Kunci

Nama : MUSTAWADIAH, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Senin, 15 Maret 2021 / 09.00 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

2. Informan Utama

Nama : IRMAYANTI
Jabatan : Guru PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Senin, 15 Maret 2021 / 09.15 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

Nama : AJENG SAKINAH ARIANTI
Jabatan : Guru PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Senin, 15 Maret 2021 / 10.00 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

Nama : LIS RAHAYU
Jabatan : Guru PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Selasa, 16 Maret 2021 / 08.30 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

Nama : NONI SARI YANTI
Jabatan : Wali Murid PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Rabu, 17 Maret 2021 / 09.00 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

Nama : ELINDA
Jabatan : Wali Murid PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Rabu, 17 Maret 2021 / 09.00 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

Nama : ISTIQOMAH
Jabatan : Wali Murid PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Rabu, 17 Maret 2021 / 09.00 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

Nama : NITTA NOVELYA
Jabatan : Wali Murid PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Rabu, 17 Maret 2021 / 09.00 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

Nama : IDARIAH
Jabatan : Wali Murid PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Rabu, 17 Maret 2021 / 09.00 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS

3. Informan Tambahan

Nama : IMAM MUSTAMIL
Jabatan : Operator Sekolah PAUD AL IKHLAS
Tanggal / Pukul : Senin, 15 Maret 2021 /09.45 WIB
Tempat : PAUD AL IKHLAS



LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Gambar 1 Gedung PAUD AL-IKHLAS
(Dokumentasi Pribadi, 2021)



Gambar 2 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Lis Rahayu
selaku Guru PAUD AL IKHLAS
(Dokumentasi Pribadi, 2021)





Gambar 3 Dokumentasi wawancara dengan ibu Ajeng Sakinah Arianti
Selaku guru PAUD AL IKHLAS
(Dokumentasi Pribadi, 2021)



Gambar 4 Dokumentasi wawancara dengan ibu Irmayanti
Selaku guru PAUD AL IKHLAS
(Dokumentasi Pribadi, 2021)



Gambar 5 Dokumentasi wawancara dengan wali murid PAUD AL IKHLAS
(Dokumentasi Pribadi, 2021)



Gambar 6 Dokumentasi wawancara dengan wali murid PAUD AL IKHLAS
(Dokumentasi Pribadi, 2021)



Gambar 7 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Imam Mustamil
Selaku Operator Sekolah PAUD AL IKHLAS
(Dokumentasi Pribadi, 2021)

